

**PENGARUH KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
PBB-P2 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI
KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH :

RIZKA DAMAYANTI

21020079

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA
BOJONEGORO
TAHUN 2025**

**PENGARUH KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN
BOJONEGORO**

SKRIPSI

Oleh :

RIZKA DAMAYANTI

NIM.21020079

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Dra. Susilowati Rahayu, MM

NUPTK. 6040746647230133

Dosen Pembimbing II



Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak

NUPTK. 7837753654232242

Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi
STIE Cendekia Bojonegoro

Oleh :

Nama Mahasiswa : Rizka Damayanti

NIM : 21020079

Disetujui dan diterima :

Hari, Tanggal : Senin, 21 Juli 2025

Tempat : STIE Cendekia Bojonegoro

Dewan Penguji Skripsi :

1. Ketua Penguji : Hermawan Budi Prasetyo, SE., MSA., Ak.
2. Sekretaris Penguji : Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak.
3. Anggota Penguji : Dina Alafi Hidayatin, SE., MA.



Diserahkan Oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bojonegoro



Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak

NUPTK. 7837753654232242

MOTTO

“Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas keanggupan. Karena Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya”
(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Cinta Pertamaku

Ayah Sumarmo

Pelita dalam gelapku

Ibu Rumiatus

Adikku tersayang

M. Arjal Sabara

Support Systemku

Yuda Feriyawan

Saudara Tanpa Darah

Nadilla Aprillia R

Siska Maya Mein Dewinda

Silvi Nor Anggraeni

ABSTRAK

Damayanti, Rizka. 2025. *Pengaruh Kepatuhan pembayaran pajak daerah pbb-p2 terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten bojonegoro*. Skripsi. Akuntansi. STIE Cendekia Bojonegoro. Dra. Susilowati Rahayu, MM, selaku pembimbing satu dan Nurul Mazidah., SE., MSA., Ak., selaku pembimbing dua.

Kata kunci: Kepatuhan Pembayaran Pajak, Penerimaan Pajak Daerah, PBB-P2, Kepatuhan Pajak, Sistem Perpajakan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Kepatuhan pembayaran pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh fenomena rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 yang masih jauh dari target, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak PBB-P2. Teknik analisis data dilakukan menggunakan regresi linier sederhana.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel Kepatuhan Membayar Pajak PBB-P2 memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah, dengan nilai *t-hitung* (2,187) lebih besar dari *t-tabel* (0,164) dan nilai signifikansi sebesar $0,031 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tepat waktu dan tepat jumlah wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2, maka penerimaan pajak daerah akan semakin meningkat. dengan nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,516. Hal ini berarti 51,6% variasi penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh Kepatuhan pembayaran pajak, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

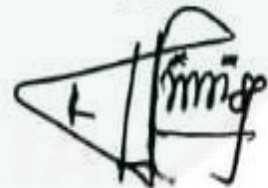
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya peningkatan Kepatuhan waktu pembayaran pajak oleh wajib pajak sangat berperan dalam mengoptimalkan penerimaan daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merancang strategi peningkatan kesadaran dan Kepatuhan pajak sebagai bagian dari penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BIODATA PENULIS

Nama : Rizka Damayanti
NIM : 21020079
Tempat, Tanggal Lahir : Bojonegoro, 1 Maret 2001
Agama : Islam
Pendidikan Sebelumnya : SMKN 2 BOJONEGORO
Nama Orang Tua / Wali : Sumarmo
Alamat : Ds. Mori Kec. Trucuk – Kab. Bojonegoro
Judul Skripsi : Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah
terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten
Bojonegoro

Bojonegoro, 15 April 2025

Penulis



Rizka Damayanti

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah :

ini: Nama : RIZKA DAMAYANTI

NIM : 21020079

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah PBB-P2 Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bojonegoro adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia ijazah dan gelar Sarjana Akuntansi yang saya terima dari STIE Cendekia untuk ditinjau kembali.

Bojonegoro, 12 Juli 2025

Yang menyatakan:



(Rizka Damayanti)

NIM. 20120079

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas limpahan rahmat dan karunia YME yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pengaruh Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bojonegoro". Penulis skripsi ini dimaksud untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar sarjana Akuntansi (S.Ak) jenjang Strata-I Program Studi Akuntansi, dan penelitiannya bertujuan untuk mengetahui, menganalisa suatu masalah yang diangkat dalam skripsi ini dan mengambil manfaat dari hasil kesimpulannya.

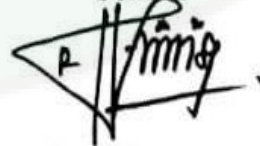
Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dengan tulus kepada :

1. Ibu Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak., selaku Ketua STIE Cendekia Bojonegoro, sekaligus Dosen Pembimbing II yang memberikan petunjuk dan bimbingan yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dina Alafi Hidayatin, SE., MA, selaku Ketua Prodi Akuntansi STIE Cendekia Bojonegoro.
3. Ibu Dra. Susilowati Rahayu, MM., selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberikan petunjuk dan bimbingan yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua orang tua saya telah memberikan dorongan semangat dan bantuan lainnya yang sangat berarti.

Akhirnya sebagai manusia biasa penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis harapan saran dan kritik dari pembaca. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri.

Bojonegoro, 15 April 2025

Penulis



Rizka Damayanti

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL SKRIPSI	I
HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
ABSTRAK.....	V
BIODATA PENULIS	VI
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	VII
KATA PENGANTAR	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN	
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Cakupan Masalah.....	5
1. Identifikasi Masalah	5
2. Cakupan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan.....	7
E. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	8
 BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR.....	 9
A. Kajian Teori dan Deskripsi Teori	9
1. Teori Kepatuhan Pajak	9
2. Teori Sistem Perpajakan	9
3. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
4. Jenis Kepatuhan Pajak	11

5. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	11
6. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	12
7. Keterkaitan Teori dengan Penelitian	13
8. Pengertian Pajak Daerah.....	13
9. Penerimaan Pajak Daerah.....	16
B. Kajian Empiris	17
C. Kerangka Berpikir.....	23
D. Hipotesis	24
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Metode dan Teknik Penelitian	26
1. Metode Penelitian	26
2. Jenis Penelitian	27
B. Jenis dan Sumber Data.....	27
1. Jenis Data	28
2. Sumber Data	28
C. Populasi, Sampel, dan Teknik sampling	29
1. Populasi.....	29
2. Sampel.....	29
3. Teknik Sampling	30
D. Definisi Operasional	31
E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	33
1. Metode Pengumpulan Data	33
2. Teknik Pengumpulan Data.....	33
F. Metode dan Teknik Analisis Data	34
1. Uji Statistik Deskriptif	34
2. Teknik Analisis Data	35
3. Uji Hipotesis	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Singkat Obyek Penelitian	38
1. Struktur Organisasi.....	38
2. Tugas Pokok dan Fungsi.....	39
B. Hasil Penelitian dan Analisis Data	44
1. Pengumpulan Data	44

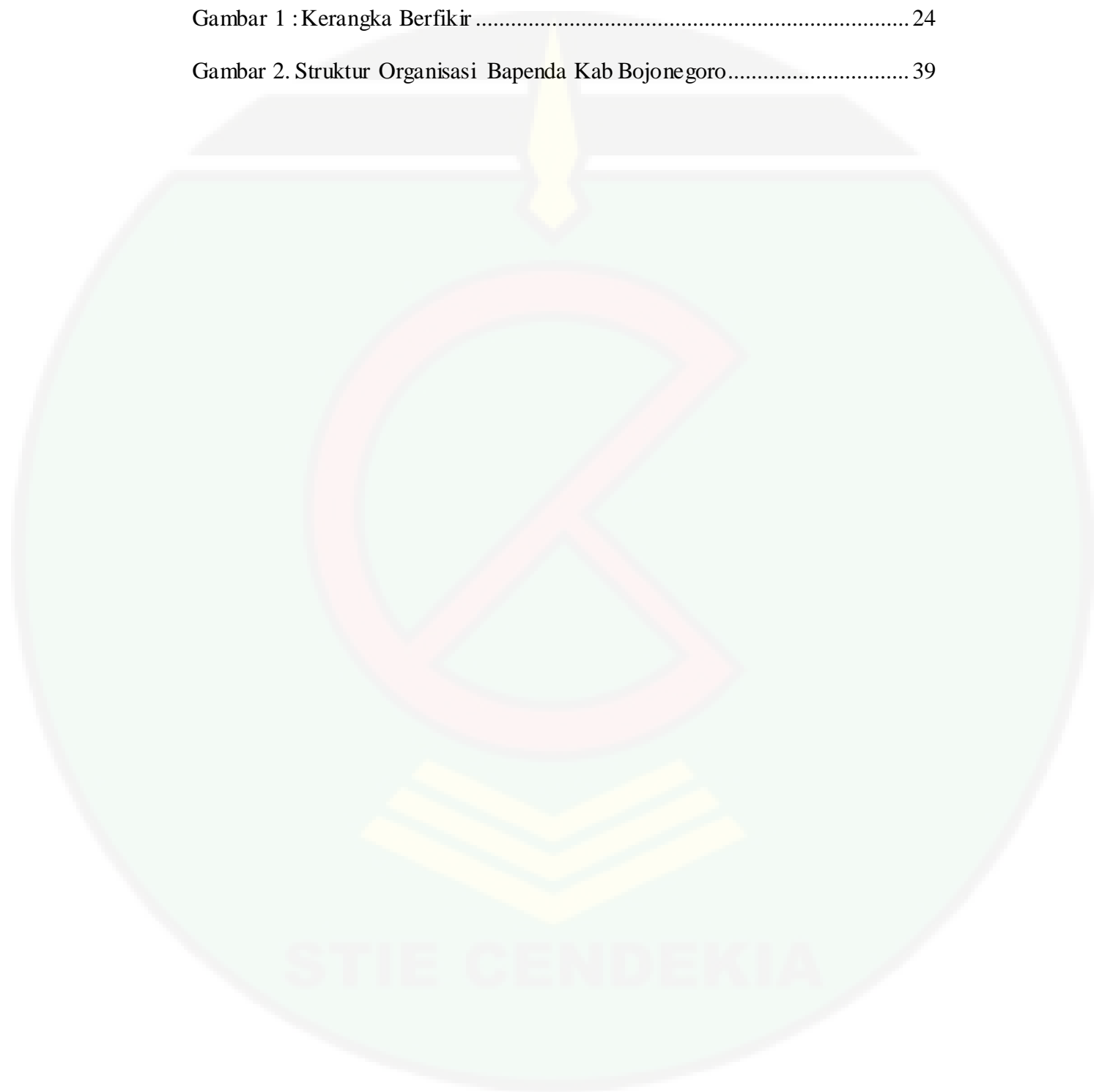
2. Analisis Data	47
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
1. Daftar Pustaka	62
2. Lampiran.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 2 : Definisi Operasional.....	31
Tabel 3 : Skala Likert.....	33
Tabel 4 : Jenis Kelamin.....	45
Tabel 5 : Jenjang Pendidikan.....	46
Tabel 6 : Usia Responden.....	47
Tabel 7 : Statistik Deskriptif.....	48
Tabel 8 : Hasil Uji Validitas dan Kepatuhan Pajak.....	49
Tabel 9 : Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak Daerah.....	49
Tabel 10 : Hasil Uji Reliabilitas.....	50
Tabel 14 : Hasil Uji t.....	53
Tabel 15 : Hasil Uji R Square.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 :Kerangka Berfikir	24
Gambar 2. Struktur Organisasi Bapenda Kab Bojonegoro.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001 membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Melalui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (kemudian disempurnakan melalui UU No. 23 Tahun 2014 dan UU No. 28 Tahun 2009), pemerintah daerah diberi kewenangan lebih besar untuk mengelola dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama PAD dan berperan penting dalam menunjang kemandirian fiskal suatu daerah. Seperti dinyatakan oleh Siahaan (2010:1), *“Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”*

Penerapan otonomi daerah di Indonesia memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangannya secara mandiri, salah satunya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam struktur PAD dan memiliki peran vital dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik. Di Kabupaten Bojonegoro, pajak daerah menyumbang persentase signifikan

terhadap total PAD. Namun demikian, permasalahan klasik yang hingga saat ini masih dihadapi adalah rendahnya tingkat Kepatuhan waktu pembayaran pajak oleh wajib pajak. Banyak wajib pajak yang tidak membayar pajaknya tepat waktu sesuai batas yang telah ditentukan, baik karena kurangnya pemahaman, kelalaian, maupun kesadaran fiskal yang rendah.

Fenomena ini mengganggu arus kas pemerintah daerah dan menyebabkan ketidakpastian dalam realisasi penerimaan pajak. Dalam laporan Bapenda Kabupaten Bojonegoro tahun 2023, disebutkan bahwa “tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu masih rendah, terutama pada sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta pajak restoran”. Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di lima desa di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, hingga tanggal 22 Juli 2024 menunjukkan angka yang masih relatif rendah. Rata-rata tingkat realisasi pajak di wilayah tersebut berada di bawah 20 persen dari target yang ditetapkan.

Menurut Kepala Bidang Pajak Daerah 2 pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bojonegoro, Hendri Eko, rendahnya realisasi PBB-P2 tersebut disebabkan oleh ketidakpastian keberadaan wajib pajak. Ia menjelaskan bahwa meskipun objek pajak terdata, keberadaan wajib pajak sering kali tidak diketahui, terutama apabila wajib pajak berdomisili di luar kota. Hal ini menghambat upaya penagihan pajak yang efektif. Rincian realisasi penerimaan pajak di lima desa tersebut adalah sebagai berikut: Desa Tambakrejo, Kecamatan Tambakrejo, dengan realisasi sebesar Rp 2.079.524 atau 2,53 persen dari target Rp 82.092.872; Desa Pagerwesi, Kecamatan Trucuk, sebesar Rp 3.873.208 atau 8,62 persen dari target

Rp 44.934.350; Desa Kuniran, Kecamatan Purwosari, sebesar Rp 15.085.710 atau 11,52 persen dari target Rp 130.953.102; Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngraho, sebesar Rp 5.322.670 atau 12,71 persen dari target Rp 41.884.824; serta Desa Jatiblimbing, Kecamatan Dander, dengan realisasi sebesar Rp 24.444.863 atau 16,27 persen dari target Rp 150.199.529. Desa Tambakrejo memiliki tingkat realisasi terendah, sedangkan Desa Jatiblimbing merupakan yang tertinggi di antara kelima desa.

Upaya peningkatan kesadaran dalam Kepatuhan pembayaran pajak harus dilakukan mengingat pentingnya Kepatuhan pembayaran dalam menjaga stabilitas fiskal daerah. Seperti dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:15), “Salah satu indikator utama efektivitas pemungutan pajak adalah tingkat Kepatuhan waktu pembayaran pajak oleh wajib pajak.” Kepatuhan pembayaran tidak hanya mencerminkan kesadaran fiskal masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan. Dalam sistem pemungutan pajak daerah yang sebagian besar menggunakan self assessment sistem, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Hal ini tentu membutuhkan tingkat Kepatuhan yang tinggi. Menurut Gunadi (2005:6), “Kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada sistem pelayanan, pengawasan, dan sanksi yang diberikan oleh fiskus.”

Namun di lapangan, rendahnya Kepatuhan pembayaran menunjukkan bahwa sistem yang ada belum sepenuhnya berjalan efektif. Sosialisasi menjadi salah satu alternatif strategi non-punitive yang digunakan oleh Bapenda untuk membangun kesadaran pajak masyarakat. Ini selaras dengan pandangan Suandy (2011:87) yang

menyatakan bahwa “Sosialisasi yang intensif berperan dalam membentuk budaya sadar pajak serta meningkatkan tingkat Kepatuhan sukarela”.

Sejumlah penelitian terbaru mendukung pentingnya aspek kesadaran, pelayanan, dan penegakan dalam meningkatkan Kepatuhan wajib pajak. Penelitian oleh Izmi & Purnamasari (2024) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan PBB-P2 di Kota Bandung. Penelitian lain oleh Ramadhani, Sulaiman, & Mubarok (2024) di Bapenda Kota Palembang menemukan bahwa sanksi pajak, moral obligation, dan kualitas pelayanan secara signifikan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak, sedangkan audit pajak justru berdampak negatif. Sementara itu, Syahrizal & Wahyudin (2024) mengungkapkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap sosialisasi dan kualitas pelayanan memiliki pengaruh kuat terhadap Kepatuhan restoran PBJT di Grogol Petamburan, Jakarta—dengan nilai R^2 masing-masing sebesar 52% dan 58%, serta pengaruh simultan sebesar 66,9%. Komalasari & Singgih (2023) juga memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak di Jakarta.

B. Identifikasi Masalah dan cakupan Masalah

1. Identifikasi Masalah

- a) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadapi tantangan signifikan terkait rendahnya tingkat Kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak (WP). Ketidaktepatan ini menyebabkan ketidakstabilan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sumber utama pembiayaan pembangunan daerah. Data

dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menunjukkan bahwa banyak WP tidak membayar pajak tepat waktu, disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kelalaian, atau ketidaktahuan terhadap kewajiban perpajakan mereka. Dampak langsungnya adalah menurunnya PAD yang membatasi anggaran pembangunan infrastruktur dan layanan publik bagi masyarakat.

- b) Rendahnya Kepatuhan pembayaran pajak di Kabupaten Bojonegoro juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan daerah serta rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat langsung dari pajak yang mereka bayar. Penelitian Winarno (2017) menggarisbawahi bahwa pengelolaan pajak daerah yang tepat dapat memberikan kontribusi signifikan pada pembangunan, sementara ketidakpatuhan membatasi proses tersebut. Meskipun Bapenda telah melakukan penyuluhan di beberapa kecamatan, upaya ini belum mampu secara menyeluruh mengatasi keterlambatan pembayaran, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.
- c) Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas sosialisasi pajak yang telah dilakukan. Pendekatan yang lebih inovatif dan inklusif sangat diperlukan agar pesan pentingnya Kepatuhan pajak dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan lebih efektif. Komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Pohan (2019), menjadi kunci untuk meningkatkan Kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

d) Dengan peningkatan kualitas dan jangkauan sosialisasi, diharapkan Kepatuhan waktu pembayaran pajak akan meningkat secara signifikan. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada penerimaan pajak daerah yang lebih stabil dan optimal, sehingga mempercepat pelaksanaan berbagai program pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat di Kabupaten Bojonegoro. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

2. Cakupan Masalah

Cakupan masalah merupakan fokus penelitian atau Batasan masalah yang jelas tentang apa yang akan diteliti. Berikut beberapa cakupan masalah yang ada:

- 1) Kepatuhan Waktu Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak
- 2) Realisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Bojonegoro
- 3) Analisis Pengaruh Kepatuhan Pembayaran terhadap Penerimaan Pajak Daerah
- 4) Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

Apakah kepatuhan pembayaran pajak Bumi dan Bangunan PBB-P2 berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan pembayaran pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan kebijakan fiskal daerah. Secara teoritis, hasil penelitian ini memperkuat teori Kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa tingkat Kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan signifikan terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. Dengan menggabungkan pendekatan ekonomis dan sosial psikologis, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku Kepatuhan pajak dalam konteks pemerintah daerah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa dalam wilayah atau variabel yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi kalangan akademis dalam pengembangan literatur di bidang perpajakan daerah dan kebijakan publik. Temuan dalam penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam kegiatan belajar mengajar, diskusi ilmiah, maupun dalam pengembangan penelitian selanjutnya yang mengangkat topik serupa.

b. Bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten Bojonegoro)

Perbaiki Strategi Peningkatan PAD Pemerintah Daerah memperoleh masukan konkret mengenai kendala dan penyebab rendahnya Kepatuhan waktu pembayaran pajak, sehingga dapat menyusun strategi yang lebih tepat dan berbasis data dalam meningkatkan penerimaan PAD.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori dan Deskripsi Teori

1. Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan Pajak digunakan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, baik karena kesadaran sendiri maupun karena adanya paksaan dari otoritas pajak. Devos (2014:2) menyatakan bahwa “taxpayers will comply voluntarily if they perceive the tax system as fair, transparent, and administered effectively”. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap keadilan dan efektivitas sistem akan memengaruhi Kepatuhan mereka, termasuk dalam hal Kepatuhan membayar pajak.

Kepatuhan dalam membayar pajak baik tepat waktu maupun tepat jumlah merupakan bagian dari indikator Kepatuhan pajak. Semakin tinggi Kepatuhan wajib pajak, maka semakin tinggi pula potensi penerimaan pajak yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah. Alasan menggunakan teori Kepatuhan pajak karena fokus penelitian ini adalah menguji pengaruh Kepatuhan pembayaran pajak, maka teori ini menjadi sangat relevan. Kepatuhan pembayaran adalah wujud nyata dari Kepatuhan wajib pajak dalam sistem self-assessment.

2. Teori Sistem Perpajakan (*Tax System Theory*)

Teori Sistem Perpajakan dikemukakan oleh Musgrave (1989 : 34) (dalam buku *Public Finance in Theory and Practice*. Menurutnya “a good tax system should be judged by the standards of equity, efficiency, administrative simplicity” pemungutan seperti self-assessment mewajibkan wajib pajak untuk

menghitung, membayar, dan melapor sendiri pajaknya, sehingga akurasi dan Kepatuhan pembayaran sangat menentukan keberhasilan sistem ini.

Jika sistem perpajakan tidak dapat menjamin kepastian dan kesederhanaan, maka akan sulit bagi wajib pajak untuk membayar dengan tepat. Sebaliknya, sistem yang efisien dan adil akan mendorong wajib pajak untuk patuh dan membayar tepat waktu. Alasan menggunakan teori ini karena variabel yang diamati (penerimaan pajak) merupakan hasil dari sistem pemungutan yang berlaku, maka teori sistem perpajakan digunakan untuk menganalisis sejauh mana sistem dapat mendukung Kepatuhan pembayaran pajak yang pada akhirnya berdampak pada penerimaan.

3. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam definisi pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), tersirat penjelasan Kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:¹³ “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Prabandaru (2019) menjelaskan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib dan patuh

yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar, dan membayar pajak terutang tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010:138), yaitu:

- 1) Kepatuhan Formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya memastikan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sudah benar atau belum.
- 2) Kepatuhan Material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak, Kepatuhan material juga dapat meliputi Kepatuhan formal. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) tersebut.¹⁴

3. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 71/PMK.03/2012, bahwa kriteria Kepatuhan wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT; Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- 2) Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut; dan
- 3) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

4. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Tambun & Witriyanto (2016) indikator untuk mengukur Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu; Menghitung jumlah pajak dengan benar;
- 2) Membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu;
- 3) Melakukan pelaporan pajak ke kantor pajak tepat waktu.

Sedangkan menurut Rahayu (2019:138) dalam Muthmainna (2017) indikator Kepatuhan wajib pajak terdiri dari 4 poin, yaitu:

- 1) Kepatuhan untuk mendaftarkan diri, yaitu wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP terdekat dari tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha wajib pajak untuk kemudian memperoleh NPWP.
- 2) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, yaitu pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank.

- 3) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan, yaitu pembayaran tunggakan pajak yang terutang dimana jumlah pajak tersebut belum dilunasi oleh wajib pajak setelah jatuh tempo.
- 4) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, yaitu wajib pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada Kantor Pelayanan Pajak dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan paling lambat 3 bulan untuk wajib pajak orang pribadi dan 4 bulan untuk wajib pajak badan setelah akhrit tahun pajak.

5. Keterkaitan Teori dengan Penelitian

Teori Kepatuhan Pajak dan Teori Sistem Perpajakan memiliki keterkaitan yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara Kepatuhan pembayaran pajak dengan penerimaan pajak daerah. Perilaku wajib pajak yang patuh (Devos, 2014) sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap keadilan dan efisiensi sistem yang dijalankan pemerintah daerah (Musgrave & Musgrave, 1989). Oleh karena itu, penggabungan kedua teori ini memberikan kerangka teoritis yang komprehensif dalam mengkaji fenomena yang diteliti.

6. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah (Mazidah, *et., al* 2019). Pajak daerah juga menjadi indikator kemandirian fiskal daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

a. Fungsi Pajak Daerah

Pajak daerah memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem keuangan daerah, terutama dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah berfungsi sebagai:

1) Sumber Pendanaan Pembangunan Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

2) Alat Pemerataan dan Redistribusi Pendapatan

Melalui kebijakan pajak, pemerintah daerah dapat menyeimbangkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat atau antar wilayah.

3) Alat Pengatur (Regulasi)

Pajak daerah dapat digunakan untuk mendorong atau menghambat kegiatan ekonomi tertentu sesuai dengan arah kebijakan pemerintah daerah.

4) Fungsi Kontrol atau Pengawasan

Pajak daerah juga memiliki fungsi sebagai alat kontrol terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui data perpajakan, pemerintah daerah dapat memantau potensi ekonomi di wilayahnya dan mengambil kebijakan

strategis berbasis data.

b. Macam-Macam Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

1. Pajak Provinsi

- a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

2. Pajak Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Air Tanah
- h) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
- i) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

7. Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah memegang posisi signifikan sebagai salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber penerimaan ini berasal dari beragam jenis pajak yang dipungut di tingkat daerah, termasuk di antaranya adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2018), penerimaa n pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang terutang kepada pemerintah daerah oleh individu maupun badan hukum. Sifat dari kontribusi ini adalah memaksa dan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di mana pembayar pajak tidak menerima imbalan secara langsung atas pembayaran tersebut.

Penerimaan pajak daerah memainkan peran yang krusial dalam menopang pembiayaan berbagai inisiatif pembangunan di tingkat daerah. Besarnya tingkat penerimaan pajak ini sangat erat kaitannya dengan tingkat Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila tingkat Kepatuhan wajib pajak tinggi, maka potensi penerimaan pajak daerah dapat terealisasi secara optimal, sehingga memberikan kontribusi maksimal terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang memengaruhi Kepatuhan wajib pajak daerah, serta strategi untuk meningkatkannya, menjadi area kajian yang relevan dalam konteks optimalisasi PAD.

B. Kajian Empiris

Penelitian mengenai pengaruh Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu penelitian dilakukan oleh Putri (2020) dari Universitas Negeri Yogyakarta, yang berjudul *"Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta."* Metodologi yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan survei melalui kuesioner yang disebarakan kepada wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Penelitian ini sejalan dengan hipotesis dalam skripsi ini, yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat Kepatuhan, maka semakin tinggi pula penerimaan pajak daerah.

Penelitian lain dilakukan oleh Siregar (2019) dari Universitas Sumatera Utara dengan judul *"Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan."* Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk menganalisis hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak berperan besar dalam memengaruhi penerimaan pajak hotel, dan menyarankan peningkatan pelayanan serta edukasi perpajakan sebagai cara untuk meningkatkan Kepatuhan. Meskipun objek pajak yang diteliti lebih spesifik, yaitu pajak hotel, namun pendekatan dan temuan utamanya relevan dengan topik skripsi ini.

Selanjutnya, Rahmawati (2021) dari Universitas Brawijaya melakukan penelitian dengan judul *"Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan*

Kepatuhan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Malang."

Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data primer dari responden wajib pajak daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor dominan dalam memengaruhi efektivitas penerimaan pajak.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang sedang dikerjakan adalah fokus pada Kepatuhan, sedangkan perbedaannya terletak pada variabel tambahan lain seperti sosialisasi dan kesadaran.

Berbeda dengan penelitian lainnya, Aditya (2022) dari Universitas Udayana meneliti pengaruh teknologi sistem pajak online terhadap Kepatuhan dan penerimaan pajak daerah. Meskipun variabel utamanya bukan Kepatuhan secara langsung, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kemudahan akses sistem pajak online dapat meningkatkan Kepatuhan, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini memberi perspektif tambahan bahwa faktor teknologi juga berkontribusi terhadap kepatuhan pajak.

Kajian-kajian empiris ini memperkuat dasar penelitian bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki hubungan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Skripsi ini memiliki kesamaan dalam fokus variabel inti, yaitu Kepatuhan dan penerimaan pajak daerah, namun memiliki perbedaan pada ruang lingkup wilayah, tahun pengamatan, dan pendekatan tertentu yang lebih difokuskan pada Kepatuhan sebagai satu-satunya variabel independen.

Tabel 1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Putri (Universitas Negeri Yogyakarta), 2020	Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta	Kuantitatif, kuesioner, analisis regresi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, maka semakin besar kontribusi mereka terhadap penerimaan pajak daerah. Selain itu, sanksi pajak yang tegas dan terstruktur juga terbukti efektif dalam mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.	<p>Persamaan : Penelitian ini memiliki persamaan dalam hal fokus kajian, yaitu membahas pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Keduanya sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada wajib pajak sebagai responden.</p> <p>Perbedaan : Menggunakan 3 variabel independen, Tidak fokus pada Kepatuhan waktu, Mengukur sanksi pajak, Tidak spesifik pada jenis pajak tertentu</p>
2	Siregar (Universitas Sumatera Utara), 2019	Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan	Regresi linier berganda	Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat Kepatuhan wajib pajak, maka semakin besar penerimaan pajak yang diperoleh pemerintah daerah. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan Kepatuhan melalui edukasi dan pelayanan pajak yang lebih baik.	<p>Persamaan : Meneliti pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah. Keduanya menggunakan metode penelitian kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada wajib pajak.</p> <p>Perbedaan : Penelitian terletak pada ruang lingkup dan variabel yang diteliti.</p>

3	Rahmawati (Universitas Brawijaya), 2021	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Kepatuhan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah	Kuantitatif deskriptif	Kepatuhan menjadi faktor dominan dalam efektivitas penerimaan pajak	<p>Persamaan : sama-sama membahas tentang faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak daerah, dengan menitikberatkan pada perilaku wajib pajak. Kedua penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada wajib pajak, serta bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perilaku wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah.</p> <p>Perbedaan : Perbedaan antara penelitian terletak pada variabel independen dan ruang lingkup kajian.</p>
4	Aditya (Universitas Udayana), 2022	Pengaruh Sistem Pajak Online terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Daerah	Kuantitatif, SEM	Teknologi mendukung peningkatan Kepatuhan yang berdampak pada penerimaan	<p>Persamaan : Sama-sama menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner kepada wajib pajak sebagai responden.</p> <p>Perbedaan : Penelitian terletak pada variabel dan ruang lingkup pembahasannya yaitu penggunaan teknologi dalam system perpajakan.</p>
5	Yuliana (Universitas Airlangga), 2018	Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Surabaya	Kuantitatif, regresi sederhana	Kepatuhan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak restoran	<p>Persamaan : Sama – sama membahas aspek perpajakan daerah, khususnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan pendapatan daerah (PAD).</p> <p>Perbedaan : Penelitian ini memiliki perbedaan yang terletak pada cakupan dan tujuan analisis.</p>

6	Ramadhani (Universitas Lampung), 2019	Pengaruh Sanksi Pajak dan Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak Daerah	Regresi berganda	Sanksi dan Kepatuhan berpengaruh positif terhadap penerimaan	<p>Persamaan : Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah fokus pada perilaku wajib pajak, serta bertujuan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah untuk mendukung pembangunan.</p> <p>Perbedaan : Penelitian terdahulu fokus penelitiannya pada perilaku wajib pajak sedangkan penelitian penulis cakupannya lebih luas</p>
7	Dewi (Universitas Sebelas Maret), 2020	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Kuantitatif, survei, analisis regresi	Kepatuhan dipengaruhi oleh pemahaman pajak dan pelayanan	<p>Persamaan : Sama-sama membahas perilaku wajib pajak sebagai faktor penting dalam perpajakan.</p> <p>Perbedaan : Kepatuhan wajib pajak UMKM sedangkan penelitian penulis penerimaan wajib pajak.</p>

Sumber : Penelitian Terdahulu 2025

C. Kerangka Berpikir

Kepatuhan wajib pajak daerah merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara sukarela, tepat waktu, dan jujur. Kepatuhan pajak meliputi aspek pelaporan pajak, pembayaran pajak, serta ketaatan terhadap ketentuan administratif lainnya. Kepatuhan ini sangat dipengaruhi oleh kesadaran, pemahaman, persepsi terhadap sistem perpajakan, serta sanksi dan insentif pemyang diberikan oleh pemerintah.

Penerimaan pajak daerah adalah jumlah dana yang diperoleh pemerintah daerah dari sektor pajak sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jenis pajak daerah antara lain meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, dan lainnya. Penerimaan ini menjadi indikator penting efektivitas pemungutan pajak yang dijalankan pemerintah daerah.

Berdasarkan teori Kepatuhan pajak (*tax compliance theory*) yang dikembangkan oleh Kirchler (2007) dan Teori Sistem Perpajakan dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989:214), Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan sistem pemungutan pajak. Wajib pajak yang patuh akan lebih tertib dalam membayar pajaknya, sehingga secara langsung dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Penelitian terdahulu juga menunjukkan hubungan positif antara Kepatuhan dan penerimaan pajak (Putri, 2020; Siregar, 2019; Rahmawati, 2021). Artinya, semakin tinggi Kepatuhan wajib pajak, semakin besar pula pajak yang berhasil dikumpulkan pemerintah daerah.



Gambar 1
Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel utama, yaitu:

- a. **Variabel Independen (X):** Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah PBB-P2
- b. **Variabel Dependen (Y):** Penerimaan Pajak Daerah

Hubungan antara Kepatuhan wajib pajak (X) dan penerimaan pajak daerah (Y1) bersifat kausal positif satu arah, artinya kenaikan dalam Kepatuhan akan menyebabkan peningkatan penerimaan pajak. Hubungan ini bukan timbal-balik (interaktif) karena penerimaan pajak bukan faktor yang memengaruhi Kepatuhan secara langsung, namun dapat menjadi umpan balik kebijakan jangka panjang.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah dan kajian teori yang telah dibahas, serta dengan merujuk pada kerangka berpikir yang dibangun, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ho : Tidak ada pengaruh dari Kepatuhan pembayaran pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah.

Ha: Terdapat pengaruh dari Kepatuhan pembayaran pajak daerah PBB-P2 terhadap penerimaan pajak daerah.

Hipotesis ini disusun berdasarkan teori Kepatuhan pajak (tax compliance theory) dan Teori Sistem Perpajakan dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989:214), yang menyatakan bahwa perilaku patuh dari wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya akan berdampak pada peningkatan penerimaan

pajak. Teori-teori ini telah didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan sistem perpajakan di daerah (Putri, 2020; Siregar, 2019; Rahmawati, 2021).

Hipotesis ini akan diuji secara empiris melalui metode kuantitatif dengan pendekatan survey untuk mengetahui apakah hubungan yang diduga secara teoritis tersebut terbukti secara nyata di lapangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dengan pendekatan survey. Pemilihan metode kuantitatif didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk menguji hipotesis yang diajukan mengenai pengaruh Kepatuhan wajib pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini memerlukan data numerik yang akan dianalisis secara statistik guna menguji hubungan antar variabel secara objektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2014), metode kuantitatif relevan digunakan dalam penelitian yang melibatkan populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian terstruktur yang selanjutnya dianalisis melalui prosedur statistik.

Pendekatan survey, yang merupakan bagian integral dari metode kuantitatif, bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan data yang diperoleh dari sampel yang representatif dari populasi yang diteliti (Sugiyono, 2014). Pendekatan survey dipilih karena penelitian ini dilakukan pada populasi yang cukup luas, namun pengumpulan data dilakukan melalui sampel dari populasi tersebut. Survey juga memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden, yaitu wajib pajak daerah, menggunakan instrumen berupa kuesioner.

Menurut Singarimbun (1989:3), penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama. Pendekatan survey dalam penelitian ini bersifat explanatory (penjelasan) karena bertujuan untuk menguji pengaruh atau hubungan kausal antara dua variabel, yaitu Kepatuhan wajib pajak daerah sebagai variabel independen dan penerimaan pajak daerah sebagai variabel dependen. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan penjelasan empiris mengenai sejauh mana Kepatuhan wajib pajak daerah berkontribusi terhadap penerimaan pajak di tingkat pemerintah daerah.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kuantitatif. Menurut (Sugiono, 2017) Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel yaitu:

1. Variabel bebas (Independent variable) yakni variabel tunggal yang tidak dipengaruhi variabel lain. Peneliti menjadikan ketepatan pembayaran pajak daerah sebagai variabel bebas yang diberi simbol X
2. Variabel terikat (Dependent Variable) yakni variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah yang diberi simbol Y

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data Kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data kuantitatif merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran yang dapat dianalisis secara statistik. Menurut Sugiyono (2019: 8) data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Artinya, data kuantitatif memiliki karakteristik objektif dan dapat digunakan untuk mengukur hubungan antar variabel secara sistematis. sebagai sumber utama dalam pengumpulan informasi.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data primer, data ini diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden, dalam hal ini para wajib pajak daerah yang terdaftar pada instansi perpajakan daerah PBB-P2 setempat. Data ini mencerminkan persepsi, sikap, dan tingkat Kepatuhan dari wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan daerahnya.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada peneliti, seperti dokumen, laporan tahunan, publikasi dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Badan Pusat Statistik (BPS), serta literatur-literatur relevan lainnya seperti jurnal, buku teks, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis yang dilakukan terhadap data primer. Dengan menggabungkan kedua jenis

data ini, diharapkan penelitian mampu memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis yang telah diajukan.

C. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak daerah yang terdaftar dan aktif membayar pajak di Bojonegoro selama periode tahun 2023-2024 yaitu sebanyak 760.071 wajib pajak. Populasi ini dipilih karena merupakan pihak yang secara langsung berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah dan menjadi fokus utama dalam menilai Kepatuhan pajak.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2019:127) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Dalam penelitian ini, sampel adalah wajib pajak daerah di Kabupaten Bojonegoro yang memenuhi kriteria sebagai Wajib pajak jenis PBB-P2. Dalam menentukan ukuran sampel, peneliti menggunakan tingkat kesalahan sebesar 10%, dan untuk menghitung ukuran sampel dari

populasi yang diketahui jumlahnya akan menggunakan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = jumlah sampel

N = jumlah populasi

e = tingkat kesalahan

Jumlah sampel ditentukan dengan rumus Slovin, dengan populasi wajib pajak PBB-P2 kabupaten Bojonegoro sebesar 760.071 dan tingkat kesalahan 10% (0,1).

$$n = \frac{760.071}{1 + 760.071(0,1)^2} = \frac{760.071}{760,71} = 99,9$$

Dengan demikian, jumlah minimal responden adalah 99,9 orang dibulatkan menjadi 100 orang.

3. Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik non-probability sampling di mana peneliti menentukan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut antara lain:

a. Sebagai Wajib pajak Daerah PBB-P2 (Aktif)

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Daerah yang terdaftar aktif sebagai wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Status aktif menunjukkan bahwa responden masih memiliki kewajiban perpajakan yang berjalan atas objek pajak yang dimilikinya, dan

masih tercatat dalam database Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebagai wajib pajak yang dikenakan pajak secara rutin setiap tahun.

- b. Telah melakukan kewajiban perpajakan setidaknya dalam 1 tahun terakhir.

Responden telah menjalankan kewajiban perpajakannya setidaknya dalam satu tahun terakhir, yang ditunjukkan melalui aktivitas pembayaran pajak paling tidak satu kali dalam periode tersebut. Hal ini menjadi indikator bahwa responden memiliki pengalaman aktual dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga informasi dan persepsi yang diberikan dapat dipercaya dan relevan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap PBB-P2.

- c. Bersedia mengisi kuesioner penelitian secara lengkap.

Pemilihan purposive sampling didasarkan pada pertimbangan bahwa tidak semua wajib pajak memiliki karakteristik yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga pemilihan responden dilakukan secara selektif agar data yang diperoleh lebih valid dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

D. Definisi Operasional

Variabel penelitian ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2019:68). Sedangkan indikator merupakan sub variabel yaitu kategori-kategori yang di pecahkan atau terbagi dari variabel. Variabel yang di teliti terbagi dua variabel yakni variabel dependent dan variabel independent. Adapun definisi oprasional variabel penelitian sebagai berikut:

Tabel 2
Definisi Oprasional

Variabel	Definisi	Item/Indikator	Skala
Kepatuhan Pembayaran Pajak Daerah	Menurut (Devos, 2014; Suandy, 2011; UU No. 28 Tahun 2009). Definisi operasional dari variabel ini adalah Perilaku wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan pemerintah daerah merupakan bagian dari indikator Kepatuhan fiskal dalam sistem self-assessment	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. 4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Rahayu, 2019:138)	Likert
Penerimaan Pajak Daerah	Menurut Mardiasmo (2009), UU No. 28 Tahun 2009, dan Musgrave & Musgrave (1989), penerimaan pajak daerah merupakan indikator penting efektivitas sistem pemungutan pajak yang dijalankan pemerintah daerah dan berperan sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).	1. Keadilan Pajak 2. Transparansi pengelolaan pajak daerah 3. Manfaat langsung yang dirasakan (Mardiasmo, D, 2018 : 208)	Likert

Sumber : Data Sekunder Diolah 2025

E. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, serta memanfaatkan

beberapa metode untuk memperoleh informasi yang valid dan relevan. Menurut Sugiyono (2017) Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara, kuesioner, dan observasi. Data sekunder berasal dari dokumentasi atau laporan lembaga lain.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik Kuesioner untuk mengumpulkan data dari responden mengenai Kepatuhan pembayaran pajak daerah dan penerimaan pajak daerah. Kuesioner dapat berisi tentang pertanyaan-pertanyaan berbasis skala likert untuk mengetahui sejauh mana mereka tepat untuk melakukan pembayaran pajak daerah dan menerima pajak daerah. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden (Sugiyono, 2017:142). Kuesioner dapat memberikan data yang relevan dan akurat mengenai objek yang diteliti seperti pendapat, sikap, pengalaman, atau karakteristik demografi responden (Nanda, 2024).

Skala pengukuran digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Skala likert merupakan skala yang berisi lima tingkat jawaban mengenai kesetujuan responden terhadap *statement* atau pernyataan yang dikemukakan melalui opsi jawaban yang disediakan. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Melalui skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Adapun skala likert

yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Skala Likert

No	Jawaban	Score
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2019:147)

Selain menggunakan kuisioner penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, seperti data penerimaan pajak daerah tahunan, jumlah wajib pajak terdaftar, tingkat realisasi pajak, dan dokumen lainnya yang diperoleh dari instansi terkait seperti Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dinas Pendapatan Daerah (Bapenda). Data ini digunakan untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran tentang kondisi objektif penerimaan pajak daerah.

F. Metode dan Teknik Analisis Data

1. Metode

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis mengenai pengaruh Kepatuhan wajib pajak daerah terhadap penerimaan pajak daerah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan pendekatan statistik.

a. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada responden. Statistik ini menyajikan informasi seperti nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, dan distribusi frekuensi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai tingkat Kepatuhan wajib pajak dan besarnya penerimaan pajak daerah yang diamati.

b. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan bantuan software statistik seperti SPSS, dan tingkat signifikansi (α) yang digunakan adalah 0,05. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai signifikansi (Sig.) $< 0,05$, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Uji Kualitas data

1) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Kuesioner dikatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan suatu hal yang akan diukur. Pengujian validitas ini dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Adapun kriteria pengujia nnya adalah sebagai berikut:

- a) Jika r_{hitung} negatif dan $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka butir pernyataan tersebut tidak valid
- b) Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pernyataan tersebut valid

2) Uji Realibilitas

Uji realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Gozali, 2010:84). Suatu variabel dikatakan reliabel jika memenuhi cronbach alpha (α) > 0.60 .

b. Uji Hipotesis Penelitian

1) Uji t

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas *independent* secara individual dalam menerangkan variabel *dependent* (Ghozali, 2017: 84). Uji t merupakan suatu cara untuk mengatur apakah suatu variabel *independent* bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Dalam pengujian ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika nilai sig uji T $< 0,05$, maka dikatakan signifikan, apabila nilai koefisien regresinya sesuai dengan arah hipotesis maka H_1 diterima atau dapat juga dikatakan ada pengaruh antara variabel *dependent* dengan variabel *independent*.

b) Jika nilai uji $T > 0,05$, maka dikatakan tidak signifikan artinya H_1 ditolak sehingga tidak ada pengaruh variabel *dependent* terhadap variabel *independent*.

2) Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa tingkat kemampuan model dalam menerangkan atau menjelaskan suatu variasi dari variabel *dependent*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya. (2022). *Pengaruh Sistem Pajak Online terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Daerah*. Skripsi. Universitas Udayana.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro. (2023). *Laporan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2023*. Bojonegoro: Bapenda.
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta. (2024, Juni). *Sosialisasi pajak daerah di semua kota administrasi (11–15 Juni 2024)*. Diakses dari <https://bapenda.jakarta.go.id>
- Dewi. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret.
- Devos, K. (2014). *Factors Influencing Individual Taxpayer Compliance Behaviour*. Springer.
- Ghozali, I. (2017). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2005). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI.
- Izmi, N., & Purnamasari, A. (2024). *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung tahun 2024*. Diakses dari <https://ojs.stiami.ac.id>
- Komalasari, D., & Singgih, E. (2023). *Pengaruh pengetahuan pajak dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan WP di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar 2023*. Diakses dari <https://ojs.stiami.ac.id>
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice*

(5th ed.). New York: McGraw-Hill.

Mazidah, N., Pratiwi, I., & Mufidaf, L. (2019). Analisis Kontribusi Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2018. *Jurnal Manajemen dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)*, 12(2), 88-98.

Pohan, C. A. (2019). *Manajemen Pendapatan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Putri. (2020). *Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Yogyakarta*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Rahmawati. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi, dan Kepatuhan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Malang*. Skripsi. Universitas Brawijaya.

Ramadhani. (2019). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kepatuhan terhadap Penerimaan Pajak Daerah*. Skripsi. Universitas Lampung.

Ramadhani, R., Sulaiman, M., & Mubarak, A. (2024). *Determinants of taxpayer compliance at Bapenda Kota Palembang*. Diakses dari <https://journal-laaroiba.com>

Salsabila Nanda. (2024). *Teknik Penyusunan Instrumen Kuesioner Skala Likert dalam Penelitian Sosial*. *Jurnal Metodologi Sosial*, 9(1), 12–18.

Siahaan, H. (2010). *Hukum Pajak Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Singarimbun, M. (1989). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.

Siregar. (2019). *Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Hotel di Kota Medan*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Syahrizal, D., & Wahyudin, A. (2024). *Pengaruh persepsi WP PBJT restoran, kualitas pelayanan dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak PBJT di*

Grogol Petamburan, Jakarta. Diakses dari <https://ojs.stiami.ac.id>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Winarno. (2017). *Pengantar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Yuliana. (2018). *Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Surabaya*. Skripsi. Universitas Airlangga.

STIE CENDEKIA

Lampiran 1 : Kuisisioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Hal: Permohonan Pengisian Kuesioner _____ Bojonegoro, 26 Mei 2025

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr/I Responden _____
Di tempat

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir (Skripsi) sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi di STIE Cendekia Bojonegoro, saya:

Nama : Rizka Damayanti
Nim 21020079

Program Studi : Akuntansi

Sedang melakukan penelitian ilmiah penyusunan skripsi dengan judul :

“PENGARUH KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH PBB-P2 TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN BOJONEGORO”

Mengharap kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk menjadi responden dengan mengisi i lembar kuisisioner ini secara lengkap dan sesuai dengan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh nanti hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Apapun jawaban dari Bapak/Ibu/Sdr/i tidak ada yang salah atau benar, serta kerahasiaan atas nama responden akan peneliti jaga sesuai etika dalam penelitian. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I yang telah mengisi dan menjawab semua pertanyaan penelitian, disampaikan terima kasih.

Hormat saya
Rizka Damayanti

IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda check list (✓) untuk setiap jawaban yang menurut bapak/ibu paling sesuai dengan diri.

1. Nama :

2. Jenis Kelamin :

☐

Laki-laki.

☐

Perempuan

3. Usia :

☐

21-30

☐

31-40

☐

41-50

☐

>50 Tahun

4. Pendidikan :

☐

SD

☐

SMP

☐

SMA

☐

D/ Sarjana

5. Jenis Pajak :

☐

PBB-P2

☐

Pajak Lainnya

A. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, dimohon bapak/ibu membaca setiap pertanyaan dengan cermat.
2. Bapak/Ibu memberikan tanda *check list* (✓) pada kolom yang sesuai dengan pilihan
3. Untuk setiap pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu alternatif if jawaban
4. Jika ada kesalahan dalam memilih alternatif jawaban, beri tanda *check list* (✓) pada kolom yang sesuai
5. Semua pertanyaan yang ada, mohon dijawab tanpa ada yang terlewatkan

B. Keterangan Jawaban

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. S : Setuju
4. SS : Sangat Setuju

KEPATUHAN/ KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

No.	PERTANYAAN	NILAI				
		STS	TS	N	S	SS
Kepatuhan untuk mendaftarkan diri						
1	Saya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tepat waktu sesuai aturan yang berlaku.					
2	Saya selalu memperbarui data pendaftaran pajak jika ada perubahan informasi.					
3	Saya memahami pentingnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak secara resmi.					
Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang						
4	Saya menghitung pajak terutang dengan cermat dan sesuai ketentuan perpajakan.					
5	Saya membayar pajak terutang secara penuh dan tepat waktu setiap periode pajak.					
Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan						
6	Jika memiliki tunggakan pajak, saya segera melunasinya tanpa menunda.					
7	Saya aktif menghubungi pihak berwenang untuk menyelesaikan tunggakan pajak.					
8	Saya berkomitmen untuk tidak membiarkan tunggakan pajak menumpuk.					
Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan						
9	Saya rutin menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan waktu yang ditetapkan.					
10	Saya memastikan data dalam Surat Pemberitahuan yang saya kirimkan adalah lengkap dan akurat.					
11	Saya menyimpan bukti penyetoran SPT sebagai dokumentasi Kepatuhan saya.					

PENERIMAAN PAJAK DAERAH

No.	PERTANYAAN	NILAI				
		STS	TS	N	S	SS
Keadilan Pajak						
1	Besaran pajak yang ditetapkan pemerintah daerah sudah sesuai dengan nilai objek pajak yang saya miliki.					
2	Hasil penerimaan pajak daerah akan memberikan dampak positif bagi pembangunan infrastruktur					
Transparansi pengelolaan pajak						
3	Pemerintah daerah memberikan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana pajak.					
4	Saya mengetahui alokasi penerimaan pajak daerah digunakan untuk pembangunan fasilitas umum.					
Manfaat langsung yang dirasakan						
5	Pajak yang saya bayarkan berdampak pada peningkatan pelayanan publik seperti kesehatan dan kebersihan.					

Lampiran 2 : Hasil Kuisisioner

NO. RESP OND EN	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1
1	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	38
2	3	4	3	4	5	3	5	2	4	4	2	39
3	4	3	2	3	4	4	4	4	2	5	4	39
4	3	2	4	5	3	5	3	3	4	4	3	39
5	3	4	3	5	4	3	4	4	3	5	2	40
6	4	3	4	4	5	4	5	2	2	3	4	40
7	4	4	2	3	3	5	3	4	4	4	3	39
8	3	2	3	4	4	3	4	3	3	5	4	38
9	4	4	4	5	5	4	3	2	4	4	2	41
10	3	3	3	3	3	5	2	4	2	4	3	35
11	4	2	2	4	4	3	4	3	3	5	4	38
12	3	4	4	5	5	5	3	4	4	3	3	43
13	4	3	3	3	3	4	2	2	3	4	2	33
14	4	4	2	4	5	3	4	3	2	5	4	40
15	3	2	4	5	4	4	3	4	4	4	3	40
16	4	3	3	3	3	5	3	3	3	5	2	37
17	4	4	4	5	4	4	4	2	2	5	4	42
18	3	3	2	4	5	3	3	4	4	5	3	39
19	4	2	4	3	4	5	3	3	3	5	2	38
20	4	4	3	4	3	4	5	2	2	5	4	40
21	3	3	2	5	5	3	3	4	4	3	3	38
22	3	2	4	4	4	4	4	3	3	4	3	38
23	4	4	3	3	3	5	2	2	3	4	2	35
24	3	3	4	5	4	4	5	4	2	5	3	42
25	4	2	2	4	5	5	3	3	3	4	4	39
26	4	4	3	3	4	5	4	3	4	4	2	40
27	3	3	4	4	5	5	5	2	2	4	4	41
28	4	3	3	5	5	5	5	3	4	3	3	43
29	3	2	2	4	5	3	3	4	3	4	4	37
30	3	3	4	5	5	4	3	2	4	4	3	40
31	4	4	3	3	3	5	4	4	3	3	2	38
32	3	2	2	4	4	3	5	3	2	4	3	35
33	3	4	4	5	5	4	3	4	3	3	3	41
34	4	3	3	5	3	5	4	3	3	5	4	42
35	3	4	2	3	4	3	3	2	4	4	2	34

36	3	3	4	4	5	5	2	3	2	4	3	38
37	4	2	3	4	3	4	5	3	3	4	4	39
38	3	3	3	5	5	3	4	4	4	4	3	41
39	4	3	2	4	4	4	3	2	3	5	2	36
40	4	4	3	4	3	5	5	3	2	4	3	40
41	3	2	4	4	4	4	3	4	3	5	4	40
42	4	3	2	3	5	3	3	3	4	3	3	36
43	3	4	4	4	4	5	5	2	3	4	2	40
44	4	3	3	4	3	4	2	3	2	5	3	36
45	3	2	4	5	5	3	4	4	3	4	3	40
46	4	3	3	4	4	4	3	3	3	5	4	40
47	3	4	2	3	3	5	2	2	4	3	2	33
48	4	3	3	5	4	4	3	3	2	5	4	40
49	3	2	3	4	5	5	4	3	4	4	3	40
50	4	3	4	4	4	5	5	4	3	4	2	42
51	3	3	2	4	5	5	3	2	2	4	3	36
52	3	4	3	4	5	5	2	4	3	3	4	40
53	4	2	4	5	5	5	4	3	4	4	3	43
54	3	4	3	4	5	3	3	2	3	4	3	37
55	4	3	2	5	5	4	2	3	3	5	2	38
56	3	2	3	3	3	4	4	4	2	4	4	36
57	3	3	4	4	4	5	3	3	4	4	2	39
58	4	4	3	5	4	4	2	3	2	5	3	39
59	4	3	2	4	5	4	5	2	3	3	4	39
60	4	3	3	5	4	4	3	4	4	4	3	41
61	3	2	3	3	4	3	2	2	3	5	3	33
62	4	4	4	5	4	4	4	3	3	4	3	42
63	4	2	2	4	3	4	3	4	3	5	2	36
64	3	3	4	4	4	5	3	3	2	4	3	38
65	4	4	3	4	4	4	2	1	3	5	4	38
66	3	3	2	3	5	3	3	1	4	3	2	32
67	4	3	3	4	4	5	4	2	2	4	4	39
68	3	3	4	4	3	4	2	1	1	5	3	33
69	4	2	3	3	2	4	4	3	3	4	4	36
70	3	3	3	4	4	4	5	2	4	5	2	39
71	4	4	2	4	4	4	4	2	1	4	3	36
72	4	2	4	5	4	5	3	2	3	3	4	39
73	3	4	2	3	4	4	2	2	1	5	3	33
74	4	3	3	4	5	5	3	2	5	4	4	42

75	4	4	4	5	4	3	3	3	4	4	3	41
76	3	2	3	4	5	4	4	2	2	5	2	36
77	4	3	3	5	3	5	2	3	2	4	4	38
78	3	4	3	4	4	4	4	4	4	5	3	42
79	4	3	2	5	5	5	5	3	3	5	4	44
80	3	4	3	3	4	3	3	2	1	4	3	33
81	4	3	5	4	5	3	2	4	4	3	4	41
82	1	1	2	5	3	4	1	2	2	5	2	28
83	3	5	5	4	5	4	4	4	3	4	4	45
84	3	3	3	5	4	4	4	4	3	5	5	43
85	1	1	2	4	4	3	2	2	3	4	3	29
86	3	2	2	3	4	4	3	1	2	2	1	27
87	5	5	3	5	3	4	3	4	5	5	5	47
88	4	3	3	4	2	2	2	1	2	2	2	27
89	4	1	1	4	4	2	4	2	1	1	2	26
90	5	3	4	4	3	4	4	4	4	5	5	45
91	1	3	1	2	2	2	1	1	2	3	1	19
92	2	1	2	5	1	2	2	2	2	2	4	25
93	5	5	4	5	5	4	3	4	5	4	4	48
94	2	2	1	4	1	2	2	3	1	1	2	21
95	4	1	2	3	3	2	2	2	2	2	1	24
96	5	4	5	5	5	5	4	4	2	1	2	42
97	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	2	18
98	5	5	2	5	4	5	4	3	5	5	4	47
99	4	2	2	2	3	2	2	2	4	2	2	27
100	3	3	3	3	2	4	2	3	2	3	2	30

STIE CENDEKIA

NO. RESPONDEN	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y
1	4	5	5	4	2	4	24
2	5	1	2	2	4	2	16
3	3	4	4	3	3	3	20
4	4	5	3	4	2	5	23
5	5	2	2	2	4	3	18
6	4	3	4	4	3	4	22
7	4	1	2	2	3	3	15
8	5	2	4	3	4	4	22
9	1	3	2	4	3	5	18
10	4	3	3	2	3	4	19
11	5	3	4	4	5	4	25
12	5	4	2	3	3	3	20
13	5	2	4	3	4	4	22
14	5	1	2	4	2	3	17
15	5	4	3	2	5	3	22
16	5	4	4	4	3	4	24
17	5	4	2	3	4	5	23
18	3	4	4	3	5	5	24
19	4	5	3	2	5	4	23
20	4	4	3	3	3	5	22
21	5	4	4	2	3	5	23
22	4	5	5	3	4	4	25
23	4	5	4	2	5	3	23
24	4	5	5	4	3	2	23
25	3	5	3	2	4	4	21
26	4	4	1	3	3	3	18
27	4	4	3	4	5	3	23
28	1	2	1	2	2	2	10
29	5	5	3	5	4	3	25
30	3	3	5	4	3	4	22
31	5	5	1	5	5	2	23
32	5	5	2	2	3	4	21
33	5	4	5	4	3	3	24
34	5	5	1	5	5	5	26
35	1	2	2	3	2	3	13
36	1	3	1	2	4	2	13
37	5	5	4	5	3	4	26

38	5	1	2	2	1	3	14
39	3	5	5	4	3	5	25
40	2	3	2	4	4	2	17
41	5	5	2	4	5	4	25
42	3	2	1	2	2	2	12
43	3	3	3	2	2	3	16
44	3	2	2	2	4	1	14
45	1	3	4	2	3	2	15
46	1	3	2	2	2	3	13
47	4	2	4	4	4	3	21
48	2	4	2	2	3	2	15
49	1	3	3	5	2	3	17
50	5	2	4	4	5	3	23
51	3	2	2	1	3	4	15
52	5	4	4	5	2	4	24
53	5	2	2	5	4	4	22
54	5	5	4	5	4	5	28
55	4	3	3	4	3	2	19
56	1	4	2	2	2	3	14
57	5	4	4	3	4	2	22
58	1	3	3	2	1	3	13
59	4	3	2	1	2	3	15
60	1	2	3	2	1	4	13
61	4	3	2	5	2	3	19
62	5	4	4	3	5	2	23
63	4	2	3	2	1	3	15
64	5	5	4	2	5	3	24
65	5	3	2	5	4	4	23
66	5	2	3	3	5	4	22
67	5	4	2	2	5	4	22
68	5	3	5	3	5	5	26
69	5	2	5	3	5	2	22
70	5	2	5	5	5	5	27
71	5	3	1	3	2	4	18
72	1	1	1	4	3	3	13
73	4	5	5	5	2	3	24
74	5	5	4	3	4	2	23
75	5	5	5	2	3	4	24
76	1	2	5	2	2	2	14

77	5	5	5	5	4	5	29
78	4	5	5	2	5	5	26
79	2	2	1	1	1	2	9
80	5	5	5	3	2	3	23
81	3	4	1	1	2	2	13
82	5	2	2	3	2	1	15
83	3	1	1	2	2	1	10
84	3	1	1	3	2	1	11
85	3	2	2	2	3	2	14
86	3	2	1	2	4	2	14
87	3	2	2	2	3	2	14
88	3	2	2	3	2	1	13
89	2	2	1	2	2	1	10
90	3	3	2	1	1	1	11
91	3	3	1	2	2	1	12
92	3	3	1	1	2	4	14
93	3	2	1	2	2	2	12
94	3	1	1	2	2	2	11
95	2	1	2	2	1	2	10
96	2	2	2	1	2	2	11
97	4	1	1	2	2	1	11
98	2	2	2	2	3	2	13
99	2	2	1	3	1	3	12
100	2	3	2	1	2	1	11



Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas

		Correlations											
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1
X1.1	Pearson Correlation	1	.399**	.225*	.181	.169	.337**	.304**	.203*	.278**	.172	.293**	.569**
	Sig. (2-tailed)		<.001	.025	.071	.093	<.001	.002	.043	.005	.088	.003	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.399**	1	.259**	.144	.242*	.313**	.153	.140	.256*	.238*	.128	.538**
	Sig. (2-tailed)	<.001		.009	.153	.015	.002	.127	.164	.010	.017	.204	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.225*	.259**	1	.348**	.267**	.404**	.212*	.281**	.191	.142	.210*	.573**
	Sig. (2-tailed)	.025	.009		<.001	.007	<.001	.034	.005	.057	.159	.036	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.181	.144	.348**	1	.339**	.193	.243*	.309**	.217*	.221*	.369**	.569**
	Sig. (2-tailed)	.071	.153	<.001		<.001	.054	.015	.002	.030	.027	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.169	.242*	.267**	.339**	1	.215*	.331**	.163	.334**	.182	.174	.568**
	Sig. (2-tailed)	.093	.015	.007	<.001		.032	<.001	.106	<.001	.070	.083	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.6	Pearson Correlation	.337**	.313**	.404**	.193	.215*	1	.239*	.210*	.185	.321**	.183	.589**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.002	<.001	.054	.032		.017	.036	.065	.001	.068	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	.304**	.153	.212*	.243*	.331**	.239*	1	.210*	.111	.182	.262**	.544**
	Sig. (2-tailed)												
	N												

	Sig. (2-tailed)	.002	.127	.034	.015	<.001	.017		.036	.273	.070	.008	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.8	Pearson Correlation	.203*	.140	.281**	.309**	.163	.210*	.210*	1	.300**	.178	.322**	.539**
	Sig. (2-tailed)	.043	.164	.005	.002	.106	.036	.036		.002	.077	.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.9	Pearson Correlation	.278**	.256*	.191	.217*	.334**	.185	.111	.300**	1	.166	.114	.523**
	Sig. (2-tailed)	.005	.010	.057	.030	<.001	.065	.273	.002		.099	.260	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.10	Pearson Correlation	.172	.238*	.142	.221*	.182	.321**	.182	.178	.166	1	.359**	.532**
	Sig. (2-tailed)	.088	.017	.159	.027	.070	.001	.070	.077	.099		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.11	Pearson Correlation	.293**	.128	.210*	.369**	.174	.183	.262**	.322**	.114	.359**	1	.555**
	Sig. (2-tailed)	.003	.204	.036	<.001	.083	.068	.008	.001	.260	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X1	Pearson Correlation	.569**	.538**	.573**	.569**	.568**	.589**	.544**	.539**	.523**	.532**	.555**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.322**	.341**	.368**	.497**	.342**	.703**
	Sig. (2-tailed)		.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.322**	1	.460**	.300**	.357**	.445**	.700**
	Sig. (2-tailed)	.001		<.001	.002	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.341**	.460**	1	.352**	.333**	.434**	.714**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001		<.001	<.001	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.368**	.300**	.352**	1	.302**	.389**	.642**
	Sig. (2-tailed)	<.001	.002	<.001		.002	<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.497**	.357**	.333**	.302**	1	.345**	.682**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	.002		<.001	<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.342**	.445**	.434**	.389**	.345**	1	.703**
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001		<.001
	N	100	100	100	100	100	100	100
Y	Pearson Correlation	.703**	.700**	.714**	.642**	.682**	.703**	1
	Sig. (2-tailed)	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabilitas

Reliability

Notes		
Output Created		11-JUN-2025 08:32:02
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet2
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	411
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00.01
	Elapsed Time	00:00:00.00

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	24.3
	Excluded ^a	311	75.7
	Total	411	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.772	11

Reliability

Notes		
Output Created		11-JUN-2025 08:32:19
Comments		
Input	Active Dataset	DataSet2
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	411
	Matrix Input	
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data for all variables in the procedure.
Syntax		RELIABILITY /VARIABLES=Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 /SCALE('ALL VARIABLES') ALL /MODEL=ALPHA.
Resources	Processor Time	00:00:00.01
	Elapsed Time	00:00:00.00

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	24.3
	Excluded ^a	311	75.7
	Total	411	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.780	6

Lampiran 5 : Hasil Uji Regresi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X1 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	.470	.370	5.21780

a. Predictors: (Constant), X1

b. Dependent Variable: Y

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	130.271	1	130.271	4.785	.031 ^b
	Residual	2668.089	98	27.225		
	Total	2798.360	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X1

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.986	3.511		3.129	.002		
	X1	.203	.093	.216	2.187	.031	0.885	1.000

a. Dependent Variable: Y

Collinearity Diagnostics^a

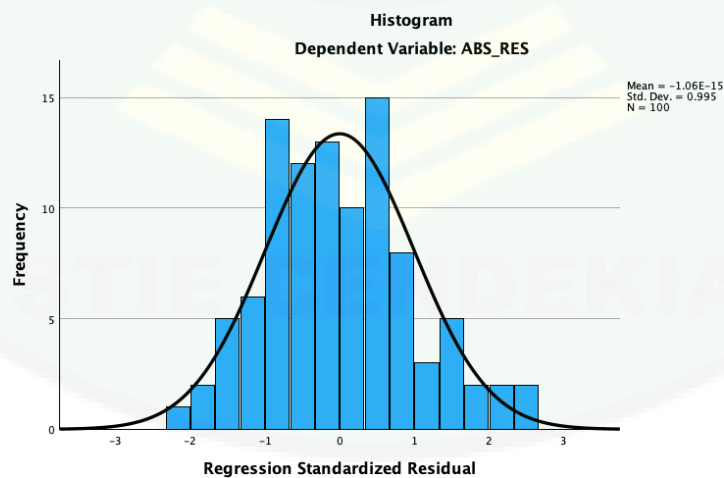
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions (Constant)	X1
1	1	1.989	1.000	.01	.01
	2	.011	13.382	.99	.99

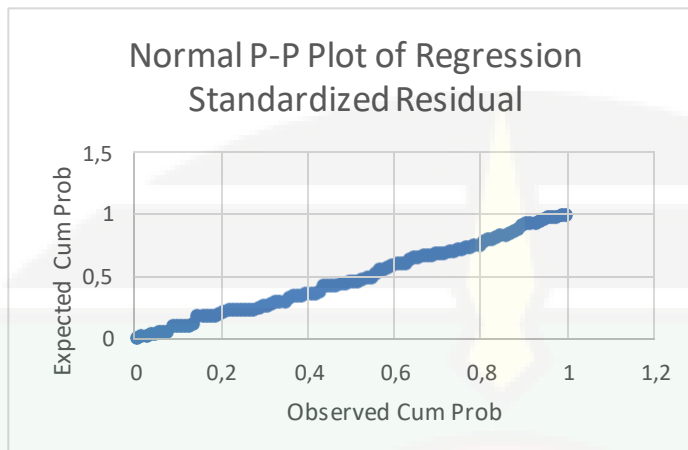
a. Dependent Variable: Y

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	14.6417	20.7350	18.5800	1.14711	100
Std. Predicted Value	-3.433	1.879	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.523	1.875	.690	.263	100
Adjusted Predicted Value	15.1813	21.1528	18.6170	1.11000	100
Residual	-10.92256	10.29610	.00000	5.19138	100
Std. Residual	-2.093	1.973	.000	.995	100
Stud. Residual	-2.119	1.983	-.003	1.005	100
Deleted Residual	-11.18927	10.40134	-.03702	5.29962	100
Stud. Deleted Residual	-2.158	2.014	-.004	1.010	100
Mahal. Distance	.005	11.787	.990	1.999	100
Cook's Distance	.000	.070	.011	.014	100
Centered Leverage Value	.000	.119	.010	.020	100

a. Dependent Variable: Y





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandar dized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		5.1913769 3
Most Extreme Differences	Absolute		.161
	Positive		.088
	Negative		-.161
Test Statistic			.161
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.		.708
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.690
		Upper Bound	.734

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Coefficients^a












Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
1	(Constant)	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		.994	1.544		.644	.521		
	X1	.097	.041	.232	2.366	.670	1.000	1.000

a. Dependent Variable: ABS_RES

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

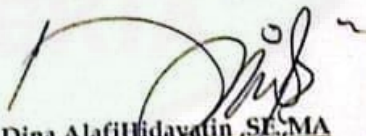
Nama : RIZKA DAMAYANTI
 NIM : 21020079
 Tahun Angkatan : 2021
 Jurusan/Prodi : Akuntansi
 Semester : VIII (DELAPAN)
 Judul Skripsi : Pengaruh Kelepatan Wajib Pajak Daerah terhadap pengendalian penerimaan pajak daerah dan pembangunan Regional.

Dosen Pembimbing : 1. Dra. Susilawati Rahayu, MM.
 2. Nurul Mazidah, SE., MSA., AK

REKOMENDASI						
No.	Tanggal	Pembimbing 1	Paraf	Tanggal	Pembimbing 2	Paraf
1.	18/3/25	Intake Ace		19/3/25	Judul	
2.	16/4/25	Bab 1, 2, 3 revisi		19/4/25	Bab 1 - 3 revisi	
3.	24/4/25	Bab 1, 2, 3 Ace		22/4/25	Bab 1 - 3 Ace	
4.	21/4/25	Seminar		21/4/25	Seminar	
5.	2/5/25	Ace ujian skripsi		23/5/25	Bab 1-5 revisi	
6.	7/5/25	Setelah di revisi		8/5/25	Bab 1-5 revisi	
7.				4/7/25	Ace ujian	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

Bojonegoro,

STIE Cendekia Bojonegoro
 Ka. Prodi Akuntansi


 Dina Alafillidayatin, SE., MA
 NUPTK.3137766667230333